

ANALISIS MODALITAS DALAM KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI LITERATUR PERBEDAAN PERNYATAAN PEJABAT PEMERINTAH TERKAIT PPN 12%

Oleh:

Karina Emilia Widyaningroh¹

Bima Kurniawan²

Dini Aminati³

Devina Vela Antika⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 240231100099@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the different modalities in the statements of two government officials regarding the implementation of the 12% Value Added Tax (VAT) in Indonesia during the administration of President Prabowo Subianto. Chairman of the National Economic Council, Luhut Binsar Pandjaitan, stated that the government will almost certainly postpone the implementation of the 12% VAT which was originally scheduled to take effect from January 1 2025, citing the need for incentives for the middle class to maintain purchasing power. On the other hand, the Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto, emphasized that there had been no discussion regarding the postponement, although he acknowledged that there were VAT exemptions on several commodities. This research examines the modalities, including aspects of probability, usuality, inclination, and obligation, in the statements of the two officials. The frequency of modalities that often appear is probability modalization 4 times and must modulation 5 times. This study uses literature review methods to contribute to discourse analysis, especially in the context of public policy communication, by showing how linguistic elements such as modality play a role in framing messages and creating public perceptions of economic stability.*

ANALISIS MODALITAS DALAM KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI LITERATUR PERBEDAAN PERNYATAAN PEJABAT PEMERINTAH TERKAIT PPN 12%

Keywords: Airlangga, Luhut, Modality, VAT.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan modalitas dalam pernyataan dua pejabat pemerintah terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pemerintah hampir pasti akan menunda penerapan PPN 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025, dengan alasan perlunya insentif bagi kelas menengah untuk menjaga daya beli. Sebaliknya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa belum ada pembahasan terkait penundaan tersebut, meskipun ia mengakui adanya pengecualian PPN pada beberapa komoditas. Penelitian ini mengkaji modalitas, termasuk aspek probabilitas, usualitas, inklinasi, dan obligasi, dalam pernyataan kedua pejabat tersebut. Frekuensi modalitas yang sering muncul yaitu modalisasi probability sebanyak 4 kali dan modulasi must sebanyak 5 kali. Studi ini menggunakan metode kajian literatur berkontribusi pada analisis wacana, khususnya dalam konteks komunikasi kebijakan publik, dengan menunjukkan bagaimana elemen linguistik seperti modalitas berperan dalam membingkai pesan dan menciptakan persepsi masyarakat terhadap stabilitas ekonomi.

Kata Kunci: Airlangga, Luhut, Modalitas, PPN.

LATAR BELAKANG

Studi ini menyelidiki terdapat perbedaan pendapat antara dua pejabat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Ketika ditemui di Jakarta, Rabu (27/11/2024), Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menyatakan pemerintah akan menunda kenaikan PPN jadi 12 % dan dapat dikatakan tidak jadi adanya kenaikan pajak yang berlaku mulai tanggal 1 januari 2025. Luhut menyatakan bahwa rencana pemerintah yang untuk memberikan bantuan sosial atau disebut juga bansos kepada masyarakat kelas menengah telah adanya peluang untuk tidak berlakunya kenaikan tarif PPN. Ia menekankan bahwa untuk mempertahankan daya belinya sebelum menerapkan adanya kebijakan kenaikan tarif PPN. Maka pemerintah harus tegas dan memulai dengan memberikan insentif kepada kelas menengah.

Sebaliknya, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa belum ada diskusi tentang penundaan penerapan PPN 12%. Airlangga menyatakan bahwa undang-undang HPP masih memungkinkan kenaikan PPN, tetapi ada beberapa barang yang tidak dikenakan PPN, seperti bahan pokok, bahan penting, dan pendidikan.

Modalitas didefinisikan sebagai cara pembicara atau penulis menunjukkan pendirian (*stance*) dan ketertarikan (*affinity*) mereka kepada seseorang atau sesuatu dalam klausa, kata, dan kalimat dalam wacana (Fairclough, 2003). Fairclough juga menyatakan bahwa modalitas berfungsi sebagai penanda hubungan sosial yang dapat menunjukkan sikap dan kuasa. Penanda modalitas seperti formal, berjarak, akrab, sederhana, dll. Sementara itu, istilah modalitas digunakan dalam ilmu linguistik untuk mengategorikan pernyataan menggunakan logika, yang menyuguhkan, mengingkari, kemungkinan, keharusan, dan lainnya (Djajasudarma, 1993; Damayanti, 2012).

Menurut Alwi (1993), pengungkapan modalitas dapat berupa keharusan atau kepastian dengan kata-kata seperti "yakni", "seharusnya", "baiknya", "pantasnya", dan sebagainya. Menurut Alwi (1992), modalitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pembicara menggunakan bahasanya.

Teori dari (Halliday & Matthiessen, 2004) membagi modalitas menjadi dua jenis: modalisasi (*modalization*), yang terdiri dari dua bagian kemungkinan (*certain, possible, perhaps, etc.*) dan frekuensi (selalu, biasa, sore, dll.) dan modulasi (*modulation*), yang terdiri dari dua bagian keharusan (*required, expected, permissible, etc.*) dan frekuensi (selalu, biasa, sore, dll.).

Penelitian terdahulu (Kurniawan et al., 2023) menyelidiki modalitas dalam bentuk pidato yang diambil dari video YouTube. Namun, belum ada penelitian yang secara mendalam mengkaji modalitas dalam teks berita mengenai perbedaan pernyataan pejabat pemerintah terkait PPN, khususnya dalam konteks perubahan tarif menjadi 12%. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi dengan mengisi kesenjangan tersebut, serta memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai bagaimana modalitas berperan dalam membentuk pemahaman dan sikap publik terhadap kebijakan pajak baru.

ANALISIS MODALITAS DALAM KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI LITERATUR PERBEDAAN PERNYATAAN PEJABAT PEMERINTAH TERKAIT PPN 12%

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode studi literatur (studi pustaka) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode dan teknik sangat penting, terutama dalam penelitian. Metode dan teknik saling berhubungan meskipun berbeda. Menurut Sudaryanto (2015), pengertian teknik sendiri berarti cara melaksanakan atau menerapkan metode itu sendiri. Sebaliknya, metode adalah cara yang harus dilaksanakan atau diterapkan. Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perbedaan pendapat antara Luhut dan Airlangga yang membahas mengenai penundaan atau tidak berlakunya PPN 12%. Penelitian ini menggunakan berbagai teknik, termasuk pemilihan sumber literatur, pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil. Sumber data dapat diakses secara online dari berita beda suara Airlangga dan Luhut tentang penundaan PPN 12%. Dengan mengunjungi situs web berikut: <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7662339/beda-penjelasan-ppn-12-luhut-bilang-ditunda-kata-airlangga-belum-dibahas> dan (2) <https://money.kompas.com/read/2024/11/29/103900626/beda-suara-airlangga-dan-luhut-soal-penundaan-ppn-12-persen>, kami meneliti dan menganalisis informasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode menelaah dan analisis. Metode penilaian ini diterapkan pada teks berita beda suara Airlangga dan Luhut tentang penundaan PPN 12%, yang kemudian dicatat dan diidentifikasi berdasarkan penggunaan modalitas dalam setiap pernyataan untuk pengumpulan data yang lebih akurat. Pertama, penulis membaca teks berita tersebut, kedua, memeriksa bagian-bagiannya, ketiga, mencatat penggunaan modalitas, dan keempat, penulis Dengan mempertimbangkan teori (Halliday & Matthiessen, 2004), metode dan pendekatan analisis penelitian ini digunakan untuk menjawab masalah saat ini, yang mencakup jenis modalitas. Selain itu, penelitian ini melihat bagaimana modalitas mengkomunikasikan perbedaan pendapat antara kedua subjek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti memeriksa hasil analisis modalitas yang dilakukan pada teks berita Airlangga dan Luhut tentang penundaan PPN sebesar 12%. Analisis modalitas dilakukan dengan memilah modalitas dari teks berita tersebut menggunakan teori (Halliday & Matthiessen, 2004) yang membagi modalitas menjadi dua bagian: *Probability (certain,*

possible, perhaps, etc) dan *Frequency (Always, Usual, Soemetimes, etc)* ataupun modalitas modulasi (*modulation*) dibagi menjadi dua yaitu, *Must (Required, Expected, Permissible, etc)* dan *Tendency (Defined, wish, wanted, etc)*.

Penggunaan modalitas yang terkandung dalam teks berita (1) tersebut, sebagai berikut:

- a. Modalitas Modalisasi *probability* **akan** muncul sebanyak 2 kali.
- b. Modalitas Modulasi *must* **harus** sebanyak 2 kali.

Tabel 1. Frekuensi modalitas teks berita 2 Beda Suara Airlangga dan Luhut soal Penundaan PPN 12%

No	Modalitas	Frekuensi	Kata Yang Sering Muncul
1.	Probability	2	Akan
2.	Must	2	Harus

Tabel 2. Beberapa contoh analisis penggunaan modalitas teks berita 1 berdasarkan Teori (Halliday & Matthiessen, 2004)

No.	Modalitas	Contoh Kalimat	Modalitas menurut Halliday & Matthiessen (2004)		
			Type	Orientation	Value
1.	Akan	Pemerintah akan menunda kenaikan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, menurut Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).	<i>Modalization (Probability)</i>	<i>Objective/ Explicit</i>	<i>Median</i>
2.	Harus	Luhut sebelumnya menyatakan bahwa penerapan PPN 12% itu harus diikuti dengan	<i>Modulation (Must)</i>	<i>Objective/ Explicit</i>	<i>High</i>

**ANALISIS MODALITAS DALAM KOMUNIKASI KEBIJAKAN
PUBLIK: STUDI LITERATUR PERBEDAAN PERNYATAAN
PEJABAT PEMERINTAH TERKAIT PPN 12%**

		stimulus untuk kelas menengah dan kelompok ekonomi yang menghadapi tantangan ekonomi.			
--	--	---	--	--	--

Berikut penjelasan penggunaan modalitas yang terkandung dalam teks berita (1) tersebut, sebagai berikut:

- a. Modalitas Modalisasi *probability* muncul pada kalimat (1) Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah akan menunda kenaikan PPN jadi 12% alias tidak jadi berlaku mulai 1 Januari 2025. Kalimat tersebut menunjukkan *probability* tingkat sedang karena berisi rencana atau niat pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Kata "akan" memperlihatkan kemungkinan atau kepastian dari tindakan yang direncanakan. (2) Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah akan ada rapat khusus dengan Presiden Prabowo Subianto membahas masalah kenaikan PPN 12%, Airlangga juga mengatakan sejauh ini memang belum ada agenda tersebut. Kalimat tersebut menunjukkan *probability* tingkat sedang karena berisi kemungkinan dimasa depan yang belum tahu kapan akan diadakanya rapat terkait kenaikan PPN 12%.
- b. Modalitas Modulasi *must* muncul pada kalimat (1) Sebelumnya, Luhut mengatakan penerapan PPN 12% harus diiringi dengan stimulus untuk masyarakat yang ekonominya sulit dan kelas menengah. Kalimat tersebut menunjukkan *must* tingkat tinggi karena menyatakan sesuatu yang dianggap penting atau wajib dilakukan. (2) "PPN 12% itu sebelum itu jadi, harus diberikan dahulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan. Ada hitungan," terang mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu. Kalimat tersebut menunjukkan *must* tingkat **tinggi** karena pemberian stimulus kepada rakyat dengan ekonomi sulit adalah hal yang wajib dilakukan sebelum kebijakan PPN 12% diterapkan).

Penggunaan modalitas yang terkandung dalam teks berita (2) tersebut, sebagai berikut:

- a. Modalitas Modalisasi *probability* akan muncul sebanyak 2 kali.

- b. Modalitas Modulasi *must* harus 1 kali dan perlu 2 kali, *tendency* ingin sebanyak 1 kali, dan *usuality* bisa sebanyak 1 kali.

Tabel 3. Frekuensi modalitas teks berita 2 Beda Penjelasan PPN 12%: Luhut Bilang Ditunda, Kata Airlangga Belum Dibahas

No	Modalitas	Frekuensi	Kata Yang Sering Muncul
1.	Probability	2	Akan
2.	Must	3	Harus, Perlu
3.	Tendency	1	Ingin
4.	Usuality	1	Bisa

Tabel 4. Beberapa contoh analisis penggunaan modalitas teks berita 2 berdasarkan Teori (Halliday & Matthiessen, 2004)

No.	Modalitas	Contoh Kalimat	Modalitas menurut Halliday & Matthiessen (2004)		
			Type	Orientation	Value
1.	Akan	Namun muncul berita bahwa kemungkinan rencana ini tidak berlaku dan akan ditunda	<i>Modalization (Probability)</i>	<i>Objective/Explicit</i>	<i>Median</i>
2.	Harus	"PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," kata dia.	<i>Modulation (Must)</i>	<i>Objective/Explicit</i>	<i>High</i>
3.	Ingin	Pemerintah memiliki tujuan ingin menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga sebesar 12% pada 1 Januari 2025.	<i>Modulation (Tendency)</i>	<i>Objective/Explicit</i>	<i>Median</i>

**ANALISIS MODALITAS DALAM KOMUNIKASI KEBIJAKAN
PUBLIK: STUDI LITERATUR PERBEDAAN PERNYATAAN
PEJABAT PEMERINTAH TERKAIT PPN 12%**

4.	Perlu	Dia berpendapat bahwa sebelum kebijakan kenaikan tariff PPN diterapkan, pemerintah perlu memberikan insentif kepada kelas menengah untuk mempertahankan daya beli mereka.	<i>Modulation (Must)</i>	<i>Objective/ Explicit</i>	<i>Median</i>
5.	Bisa	“Jadi kami di sini sudah dibahas dengan Bapak Ibu sekalian (Komis XI), sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11/2024).	<i>Modulation (Usuality)</i>	<i>Objective/ Explicit</i>	<i>Low</i>

Berikut penjelasan penggunaan modalitas yang terkandung dalam teks berita (1) tersebut, sebagai berikut:

- a. Modalitas Modalisasi *probability* muncul pada kalimat (1) Saat itu, Bendahara Negara itu memastikan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan tetap dilaksanakan tahun depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kalimat tersebut menunjukkan *must* tingkat sedang karena kebijakan tersebut belum terjadi, tetapi dipastikan akan terjadi di masa depan. (2) Namun kemudian muncul kabar bahwa kemungkinan rencana ini akan ditunda. Kalimat tersebut menunjukkan *probability* tingkat sedang karena tindakan penundaan tersebut belum terjadi, tetapi direncanakan atau diperkirakan terjadi penundaan.
- b. Modalitas Modulasi *must* muncul pada kalimat (1) "PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," kata dia. Kalimat

tersebut menunjukkan *must* tingkat tinggi karena pemberian stimulus merupakan suatu keharusan atau prasyarat yang tidak boleh diabaikan sebelum penerapan PPN 12%. (2) Menurut dia, pemerintah perlu terlebih dahulu memberikan insentif kepada kelas menengah untuk menjaga daya belinya sebelum kebijakan kenaikan tarif PPN diberlakukan. Kalimat tersebut menunjukkan *must* tingkat sedang karena memberikan insentif suatu tindakan yang penting dan dianggap wajib dilakukan sebelum kebijakan kenaikan tarif PPN diberlakukan. (3) “Jadi kami di sini sudah dibahas dengan Bapak Ibu sekalian (Komis XI), sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11/2024). Kalimat tersebut menunjukkan *must* tingkat sedang karena tindakan yang akan dilakukan, yaitu menyiapkan sesuatu, dianggap penting atau dibutuhkan agar suatu kebijakan atau rencana dapat terlaksana dengan baik. Modulasi *tendency* muncul pada kalimat Pemerintah berencana ingin menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kalimat tersebut menunjukkan *tendency* tingkat sedang karena pemerintah memiliki keinginan atau rencana untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi belum terjadi atau belum dipastikan akan terwujud. Modulasi *usuality* muncul pada kalimat “Jadi kami di sini sudah dibahas dengan Bapak Ibu sekalian (Komis XI), sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11/2024). Kalimat tersebut menunjukkan *usuality* tingkat rendah karena dengan persiapan yang tepat, kemungkinan untuk menjalankan kebijakan atau aturan tersebut mungkin dapat dilakukan.

Dari teks berita 1 dan 2 dengan materi pembahasan yang sama tentang pendapat dari Airlangga dan Luhut rencana kenaikan PPN menjadi 12%, tetapi dari sumber berita yang berbeda teks berita 1 dari detik.com dan teks berita ke 2 dari kompas .com menghasilkan persamaan bahwa menunjukkan pernyataan Luhut cenderung menggunakan modalitas probabilitas tinggi dan inklinasi yang menekankan kepastian atas penundaan, sementara pernyataan Airlangga menunjukkan modalitas usualitas dan obligasi yang merefleksikan pendekatan normatif terhadap implementasi kebijakan.

Namun, terdapat perbedaan diantara teks berita 1 dan 2 dalam hal frekuensi kemunculan modalitas. Teks berita 1 kata yang paling sering muncul yaitu modalisasi *probability* akan sebanyak 2 kali dan modulasi *must* harus sebanyak 2 kali. Sedangkan,

ANALISIS MODALITAS DALAM KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI LITERATUR PERBEDAAN PERNYATAAN PEJABAT PEMERINTAH TERKAIT PPN 12%

teks berita 2 kata yang paling sering muncul yaitu modalisasi *probability* akan sebanyak 2 kali dan modulasi *must* perlu sebanyak 2 kali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Modalitas yang digunakan pada teks berita (1) dan (2) disimpulkan bahwa hasilnya menunjukkan pernyataan Luhut cenderung menggunakan modalitas probabilitas tinggi dan inklinasi yang menekankan kepastian atas penundaan, sementara pernyataan Airlangga menunjukkan modalitas usualitas dan obligasi yang merefleksikan pendekatan normatif terhadap implementasi kebijakan. Dari kedua teks berita menghasilkan total frekuensi modalitas yang sering muncul yaitu modalisasi *probability* sebanyak 4 kali dan modulasi *must* sebanyak 5 kali.

Kemungkinan arah penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan penelitian ini ialah dengan merubah metode penulisan menggunakan studi kasus untuk menganalisis langsung pada lapangan, sehingga data yang dihasilkan dapat lebih valid. Selain itu, untuk mengembangkan pengetahuan tentang modalitas penelitian selanjutnya dapat mencari konteks lain untuk diteliti selain pidato dan teks berita.

DAFTAR REFERENSI

- Afrisyah, M. & Kurniawan, B. (2024). Pemanfaatan modalitas dalam pidato inspiratif: analisis retorika pidato Maudy Ayunda sebagai JUBIR G20. *Journal of Contemporary Issues in Primary Education (JCIPE)*. 2. 31-35.
- Estherina, I., Joniansyah, Izzuddin, H. (2024). Siap-siap PPN Naik Jadi 12 Persen Januari 2025, Pengusaha Muhammadiyah Minta Dibatalkan. <https://www.tempo.co/ekonomi/siap-siap-ppn-naik-jadi-12-persen-januari-2025-pengusaha-muhammadiyah-minta-dibatalkan-1169852.html>, diakses tanggal 17 Desember 2024.
- Hikam, H. A. & Damayanti, A. (2024). Beda Penjelasan PPN 12%: Luhut Bilang Ditunda, Kata Airlangga Belum Dibahas. <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7662339/beda-penjelasan-ppn-12-luhut-bilang-ditunda-kata-airlangga-belum-dibahas.html>, diakses tanggal 3 Desember 2024.
- Kurniawan, B., Hidayat, A. A., Saputra, S. T. B., Mustofa, R. A., & Nurcahyani, H. (2024). Modalitas dalam Pidato Joko Widodo “Mempromosikan Investasi

- Indonesia dalam Agenda Ecosperity Week 2023”: Linguistik Fungsional Sistemik. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. 2. 1-8. DOI: 10.62281.
- Kurniawan, B., Puspitasari, D., F. Qatrunada, N., Tirtoaji, W., & Viviana, D. (2024). Modalitas dalam sambutan Presiden Joko Widodo dalam peluncuran govtech Indonesia linguistik fungsional sistemik. *Journal of Contemporary Issues in Primary Education (JCIPE)*. 2. 19-24.
- Kurniawan, B., Putri, V. S. K., & Putri, V. N. P. (2024). Modalitas dalam Pidato Maudy Ayunda “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” dalam Kajian Linguistik Fungsional Sistemik. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. 2. 1-8. DOI: 10.62281
- Pardede, J. F. (2010). Pengungkapan Modalitas Can dalam Bahasa Inggris. *Jurnal Bahasa Asing*. 6. 109-120.
- Rahayu. I. R. S. & Djumena. E., (2024). Beda Suara Airlangga dan Luhut soal Penundaan PPN 12%. <https://money.kompas.com/read/2024/11/29/103900626/beda-suara-airlangga-dan-luhut-soal-penundaan-ppn-12-persen.html>, diakses tanggal 3 Desember 2024.
- Risal, Husni, A. R., Hakim, M. R. P., Kurniawan. B. (2024). Modalitas dalam Teks Pidato Putin Mereka Mengerti Perang Nuklis dengan Analisis Pendekatan Halliday & Matthiessen (2004) serta Firclough (Santosa, 2012). *Jurnal Media Akademik (JMA)*. 2.1-9. DOI: 10.62281.
- Simanjuntak, S. (2024). Ini Alasan Pemerintah Gelontarkan Insentif Fiskal saat PPN Naik jadi 12%. <https://www.tempo.co/ekonomi/siap-siap-ppn-naik-jadi-12-persen-januari-2025-pengusaha-muhammadiyah-minta-dibatalkan-1169852.html>, diakses tanggal 17 Desember 2024.
- Soelistiyowati, R. R. (2016). Pengungkapan Modalitas Can dan Could pada Penerjemahan Bahasa Inggris ke Dalam Bahasa Indonesia. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*. 5. 152-162.